

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xx
BAB I PERKEMBANGAN PENGERTIAN POLITIK HUKUM DARI SUATU ISTILAH SAMPAI MENJADI NAMA SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN BARU DALAM LINGKUNGAN ILMU-ILMU SOSIAL	1
A. Perkembangan Umum Istilah Politik Hukum	2
B. Perkembangan Periode Pertama: Kelahiran Istilah Politik Hukum dalam Khazanah Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia	6
C. Perkembangan Periode Kedua: Pengertian Politik Hukum Sebagai Kebijakan Hukum yang Ditetapkan oleh Negara atau Pemerintah (Penguasa)	12
D. Perkembangan Periode Ketiga: Politik Hukum Sebagai Objek Kajian Ilmu Politik	18
E. Perkembangan Periode Keempat: Studi Ilmiah Tentang Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	27
F. Perkembangan Periode Kelima: Studi Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan dalam Lingkungan Disiplin Hukum	30
G. Perkembangan Periode Keenam: Kelahiran Ilmiah Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu-ilmu Sosial dan Cabang Ilmu Politik	34
BAB II PERKEMBANGAN ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU MATA KULIAH PADA KURIKULUM FAKULTAS HUKUM	39
A. Kurikulum Fakultas Hukum dan (Ilmu) Politik Hukum	40
B. Latar Belakang Kelahiran Ilmu Politik Hukum	50
C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Ilmu Politik Hukum	57
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KELAHIRAN ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN DAN MANFAAT SERTA TUJUAN MEMPELAJARI (ILMU) POLITIK HUKUM	59
A. Latar Belakang Kelahiran Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	60
B. Manfaat dan Tujuan Mempelajari Politik Hukum atau Studi Ilmiah tentang Politik Hukum atau Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	69
1. Manfaat Mempelajari Mata-mata Kuliah Nonhukum Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum	69
2. Manfaat Mempelajari Mata Kuliah Politik Hukum atau Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	75
BAB IV ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI CABANG ILMU POLITIK DALAM RUMPUN ILMU-ILMU SOSIAL DALAM BINGKAI ASPEK-ASPEK ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI, SERTA AKSILOGI ILMU PENGETAHUAN	83
A. Unsur-unsur Ilmu Pengetahuan dalam Perspektif Filsafat Ilmu	84
1. Karakteristik Ilmu Pengetahuan Ilmiah (Science)	84
2. Unsur Ontologi Ilmu Pengetahuan	86
3. Unsur Epistemologi Ilmu Pengetahuan	88
4. Unsur Aksiologi Ilmu Pengetahuan	89
B. Unsur-unsur Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	90
1. Hakikat Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	90
2. Unsur-unsur Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	93
C. Aksiologi Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	120

BAB V	OBJEK MATERIAL DAN OBJEK FORMAL ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN SERTA HUBUNGANNYA DENGAN CABANG ILMU PENGETAHUAN LAIN	125
A.	Objek Material dan Objek Formal Ilmu Pengetahuan	126
B.	Objek Material Ilmu Politik Hukum	128
C.	Objek Formal Ilmu Politik Hukum	133
D.	Hubungan Ilmu Politik Hukum Dengan Cabang Ilmu Pengetahuan Lain	139
1.	Hubungan Ilmu Politik Hukum Dengan Ilmu Politik	139
2.	Hubungan Ilmu Politik Hukum Dengan Sosiologi Hukum	141
3.	Hubungan Ilmu Politik Hukum Dengan Sejarah Hukum	142
4.	Hubungan Ilmu Politik Hukum Dengan Ilmu Hukum	144
5.	Hubungan Ilmu Politik Hukum Dengan Filsafat Hukum	145
BAB VI	TEMPAT KEDUDUKAN ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN DALAM PERSPEKTIF DISIPLIN HUKUM DAN DISIPLIN SOSIAL (CABANG ILMU POLITIK)	147
A.	Kedudukan Ilmu Politik Hukum Sebagai Cabang Disiplin Hukum	148
B.	Kedudukan Ilmu Politik Hukum Sebagai Cabang Ilmu Politik	166
1.	Kebijakan Publik (Public Policy) Sebagai Objek Kajian Ilmu Politik	166
2.	Kebijakan Hukum Sebagai Objek Formal Ilmu Politik Hukum	172
BAB VII	BATAS-BATAS RUANG LINGKUP WILAYAH KERJA ATAU MEDAN BERKIPRAH DAN TITIK FOKUS PERHATIAN ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN	179
A.	Pengantar	180
B.	Batas-Batas Ruang Lingkup Wilayah Kerja atau Medan Berkiprah Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	184
1.	Beberapa Pandangan yang Berbeda Tentang Batas-batas Ruang Lingkup Wilayah Kerja atau Medan Berkiprah Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	184
2.	Wawasan Sempit Tentang Batas-batas Ruang Lingkup Wilayah Kerja atau Medan Berkiprah Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	187
3.	Wawasan yang Lebih Luas Tentang Batas-batas Ruang Lingkup Wilayah Kerja atau Medan Berkiprah Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	196
4.	Wawasan yang Terluas Tentang Batas-batas Ruang Lingkup Wilayah Kerja atau Medan Berkiprah Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan	199
BAB VIII	KARAKTERISTIK OBJEK FORMAL ILMU POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU CABANG ILMU PENGETAHUAN DALAM PERSPEKTIF METODE PENDEKATAN FORMAL DAN INFORMAL	205
A.	Karakteristik Objek Formal Ilmu Politik Hukum Dalam Perspektif Metode Pendekatan Formal	206
1.	Pengantar tentang Ruang Lingkup Objek Formal Ilmu Politik Hukum	206
2.	Kebijakan Umum (Public Policy) Pada Bidang-Bidang Nonhukum	211
B.	Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i>) Sebagai Objek Formal Ilmu Politik Hukum Dalam Perspektif Metode Pendekatan Formal	214
1.	Karakteristik Kebijakan Hukum (<i>Legal Policy</i>) yang Berkenaan Dengan Hukum Positif yang Berlaku Pada Saat Ini Sebagai Objek Formal Ilmu Politik Hukum	214
2.	Karakteristik Kebijakan Hukum yang Berkenaan Dengan Arah dan Perkembangan Hukum Yang Akan Datang (Hukum Yang Dicitacitakan)	221
C.	Karakteristik Objek Kajian Ilmu Politik Hukum Sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Metode Pendekatan Informal	224

1.	Tujuan Negara Sebagai Landasan Cita-cita Kebijakan Hukum	224
2.	Kondisi Realitas Masyarakat Aktual	226
3.	Struktur Masyarakat	230
4.	Nilai-nilai Budaya Masyarakat	233
5.	Konfigurasi Politik atau Format Politik	236
6.	Perkembangan Masyarakat Internasional	242
BAB IX	KARAKTERISTIK KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL PERMANEN DAN KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL TEMPORER SEBAGAI OBJEK FORMAL ILMU POLITIK HUKUM	245
A.	Karakteristik Kebijakan Hukum Nasional Permanen (<i>Permanent National Legal Policy</i>)	246
B.	Karakteristik Kebijakan Hukum Nasional Temporer (<i>Temporary National Legal Policy</i>)	257
1.	Hakikat Kebijakan Hukum Nasional Temporer	257
2.	Kebijakan Hukum Tentang Fungsi Sistem Hukum atau Tata Hukum Sebagai Sarana (Instrumen) Kebijakan Umum dan Kebijakan Hukum	258
3.	Kebijakan Hukum Tentang Materi-Muatan Sistem Hukum atau Tata Hukum	260
4.	Kebijakan Pembentukan Hukum, Penegakan Hukum, dan Penerapan Hukum	270
BAB X	PENUTUP	285
A.	Epilog (Catatan Akhir Penulis)	286
B.	Harapan Penulis Untuk Masa Depan	286
DAFTAR PUSTAKA	288
INDEKS	292